



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI VI DPR RI**  
**BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN**  
**PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN**

---

Rapat ke : 6 (enam)  
Tahun Sidang : 2025-2026  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VI DPR RI  
Rapat Dengan : Menteri Perdagangan RI  
Hari, Tanggal : Kamis, 4 September 2025  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Adisatrya Suryo Sulisto (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2026  
Hadir :  
1. 30 orang dari 47 Anggota Komisi VI DPR RI;  
2. Menteri Perdagangan RI, Sdr. Budi Santoso;  
3. Wakil Menteri Perdagangan RI, Sdri. Dyah Roro Esti Widya Putri.  
4. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Sdr. Muhammad Mufti Mubarok.  
beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada pukul 10.42 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 4 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Perdagangan RI terkait Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran T.A 2026 nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Pagu Anggaran Belanja K/L dan DAK Khusus TA 2026, sebesar Rp1.400.364.230.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri dari 3 Program yaitu:
  - a. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp34.457.030.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*)
  - b. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp88.890.018.000 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Belas Ribu Rupiah*)
  - c. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.277.017.182.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan Kementerian Perdagangan RI dan mendukung usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui surat nomor: PR.02.00/508/M-DAG/SD/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Tahun 2026, sebesar Rp586.635.770.000 (*Lima Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) terdiri dari:
  - a. Belanja operasional sebesar Rp153.916.976.000 (*Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) (26,24%)
  - b. Belanja non operasional sebesar Rp432.718.794.000 (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) (73,76%).
3. Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran program revitalisasi pasar rakyat sesuai Bagian Keempat Angka 31 Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.424.000.000.000 (*Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Ketua BPKN terkait Pagu Anggaran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan Nomor PR.03.00/3032/SJ-DAG.1/UND/07/2025, Tanggal 30 Juli 2025 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026, sebesar Rp4.397.912.000 (*Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) atau 21,4% dari total usulan sebesar Rp20.585.163.000 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pagu Operasional sebesar Rp1.720.484.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*)
  - b. Pagu Non Operasional sebesar Rp2.677.428.000 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.585.163.000 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
6. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan Review dan Revisi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
7. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan peran BUMN (Perum Bulog/*ID Food*) sebagai distributor produk “Minyak Kita” untuk memastikan harga yang sampai ke masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
8. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan lengkap.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.10 WIB.

**MENTERI  
PERDAGANGAN RI,**

**Ttd.**

**BUDI SANTOSO**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**Ttd,**

**ADISATRYA SURYO SULISTO  
A-206**